

PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PADA KPU KABUPATEN BATOLA

Noor Baiti, Murdiansyah Herman², Fika Fibriyanita³

¹Administrasi Publik, 63201, FISIP, Uniska MAB, 16120095

²Administrasi Publik, 63201, FISIP, Uniska MAB, 1109127301

³Administrasi Publik, 63201, FISIP, Uniska MAB, 1121028803

noorbaiti183@yahoo.com

ABSTRAK

NOOR BAITI, NPM. 16.12.0095 PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PADA KPU KABUPATEN BATOLA. Bimbingan Bapak Murdiansyah Herman sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Fika Fibriyanita sebagai Co Pembimbing.

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah, untuk mengetahui dan juga menganalisa Prosedur Perencanaan Dan Pendistribusian Logistik Pada KPU Kabupaten Batola.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Prosedur Perencanaan Dan Pendistribusian Logistik Pada KPU Kabupaten Batola.

Hasil penelitian menunjukkan Distribusi logistik melalui jalur sungai dapat terjadi masalah yaitu perahu yang terbalik atau kemasukan air. Strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Barito Kuala dengan memasukkan logistik pemilu ke dalam bungkus plastik, dan memasukkannya ke dalam tong plastic. Syarat agar logistik pemilu berfungsi efisien dan efektif antara lain tepat spesifikasi teknis, tepatkualitas, tepat kuantitas, tepat prosedur, tepat waktu, tepat anggaran dan tepat sasaran.KPPS harus sudah menerima alat kelengkapan TPS minimal 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Faktor-faktor yang menghambat distribusi logistik tepat waktu di KPU Kabupaten Barito Kuala dalam pemilu legislatif tahun 2014 yaitu kondisi geografis Kabupaten Barito Kuala yang sulit.Struktur fasilitas saluran distribusi logistik KPU Kabupaten Batola langsung mendistribusikan logistik dari gudang logistik ke KPPS didampingi oleh PPK dan PPS, Permasalahan yang terjadi pada struktur fasilitas distribusi logistik adalah kurangnya ketersediaan sarana transportasi . Pengadaan persediaan logistik dilakukan dengan metode e-tendering/e-katalog LKPP dan pengadaan langsung. Permasalahan yang terjadi dalam pengadaan persediaan logistik adalah ada beberapa item logistik yang pengadaannya terlambat, ada beberapa item logistik yang tidak lengkap halaman dan jumlahnya, dan kedatangan logistik dari penyedia tidak bersamaan menyebabkan sistem logistik tidak berjalan dengan baik. Permasalahan yang terjadi dalam penanganan dan penyimpanan adalah ada beberapa item logistik yang pengadaannya terlambat, keterlambatan pendistribusian logistik dari penyedia. Hal ini menyebabkan terlambatnya kegiatan pengepakan logistik, karena pengepakan dilakukan harus menunggu logistik lengkap. Pada akhirnya menyebabkan jadwal pendistribusian logistik tidak sesuai dengan perencanaan

Kata Kunci : Perencanaan, Pendistribusian, Logistik

ABSTRACT

NOOR BAITI, NPM. 16.12.0095 LOGISTIC PLANNING AND DISTRIBUTION PROCEDURE IN BATOLA REGENCY KPU. Guidance Mr Murdiansyah Herman as the Principal Advisor and Ms Fika Fibriyanita as Co Advisor.

The purpose of this study is, to determine and also to analyze the Logistics Planning and Distribution Procedure at the KPU of Batola Regency.

In this study the authors used a qualitative approach, which is to find out or describe the reality of the events under study so that it makes it easier for the authors to obtain objective data in order to know and understand the Logistic Planning and Distribution Procedures at the KPU of Batola Regency.

The results showed that the logistics distribution through the river could cause problems, namely the boat overturned or the water entered. The strategy undertaken by the KPU of Barito Kuala Regency is to put election logistics into plastic wrap and put it in plastic vats. Requirements for election logistics to function efficiently and effectively include the right technical specifications, the right quality, the right quantity, the right procedure, the right time, the right budget and the right target. PPPs must have received the TPS fittings at least 1 day before polling day. The factors that hindered the distribution of logistics on time at the KPU Barito Kuala Regency in the 2014 legislative elections, namely the difficult geographical conditions of Barito Kuala Regency. The problem that occurs in the structure of the logistics distribution facility is the lack of availability of transportation facilities. The logistics inventory is procured using the LKPP e-tendering / e-catalog method and direct procurement. The problems that occur in the procurement of logistics supplies are that there are some logistics items that are procured late, there are some logistics items that are incomplete in pages and quantities, and the arrival of logistics from providers does not coincide, causing the logistics system to not run properly. The problems that occur in handling and storage are that there are several logistical items that are procured late, and delays in logistics distribution from providers. This causes the logistics packaging activity to be delayed, because the packing is done having to wait for complete logistics. In the end, the logistics distribution schedule did not match the plan

Keywords: Planning, distribution, logistics

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai

tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Barito Kuala disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Nomor: 63 /Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2015-2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015–2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan KPU Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Pemilu adalah proses merubah suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara baik eksekutif atau legislatif, tingkat nasional maupun tingkat daerah. Untuk dapat merubahnya memerlukan sistem pemilu (*electoral systems*), proses penyelenggaraan tahapan pemilu (*electoral processes*), dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara atau logistik pemilu.

Surat suara, dan formulir sertifikat hasil penghitungan suara digunakan secara langsung untuk merubah suara pemilih, yang lain digunakan sebagai sarana pendukung. Manajemen logistik pemilu dimulai dari proses perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan dan pengawasan.

Distribusi logistik yang tidak tepat waktu merupakan salah satu masalah manajemen logistik. Selain itu faktor infrastruktur transportasi yang minim di sejumlah daerah, dan kondisi geografis yang sulit menjadi tantangan dalam mendistribusikan logistik pemilu.

Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan adalah salah satu daerah yang menjadi prioritas distribusi logistik, karena untuk mendistribusikan logistik pemilu ke TPS dalam beberapa kecamatan memerlukan waktu hingga satu hari. Selain itu biaya distribusi logistik di daerah itu cukup besar. Dalam distribusi logistik, KPU Kabupaten Barito Kuala memprioritaskan wilayah yang sulit di perbatasan dan pedalaman. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PADA KPU KABUPATEN BATOLA**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan pada penelitian ini adalah :
Bagaimana Prosedur Perencanaan Dan Pendistribusian Logistik Pada KPU Kabupaten Batola ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini : Untuk mengetahui dan juga menganalisa Prosedur Perencanaan Dan Pendistribusian Logistik Pada KPU Kabupaten Batola.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini diambil berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, yaitu Prosedur Perencanaan Dan Pendistribusian Logistik Pada KPU Kabupaten Batola. Teknik pengumpulan data menggunakan data observasi, kepustakaan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di Kabupaten Barito Kuala terdapat beberapa TPS yang sulit dijangkau. Dari Kabupaten Barito Kuala, logistik dibawa dan diturunkan di kecamatan. Untuk 2 desa tersulit, logistik langsung diturunkan ke desa. Terdapat logistik pemilu yang ditinggalkan di 6

kecamatan dan 2 desa di dengan medan yang sulit. Menurut laporan penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2014 KPU Kabupaten Barito Kuala terdapat permasalahan terkait logistik pemilu tahun 2014 di Kabupaten Barito Kuala, yaitu (1) informasi yang minim tentang sistem informasi logistik (SILOG) di karena masalah sambungan internet, (2) SDM penyelenggara adhoc yang rendah terkait logistik, (3) keterlambatan distribusi logistik dari KPU RI ke KPU Kabupaten Barito Kuala, yang berdampak pada terhambatnya distribusi ke daerah dengan medan sulit.

Pemilu membutuhkan pendanaan besar yang harus dianggarkan pemerintah. Sebagai penyelenggara pemilu, kewenangan untuk merancang, menyusun, dan menetapkan perencanaan anggaran pemilu terletak pada penyelenggara pemilu dengan dibantu para ahli anggaran yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai anggaran kepegiluan. KPU Kabupaten Barito Kuala dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan masalah anggaran khususnya distribusi logistik kepada KPU RI, mengusulkan agar anggaran pemilu khususnya terkait transportasi mengikuti standarisasi dari pemerintah daerah. Alasannya sederhana, standarisasi pemerintah daerah itu sudah disurvei sesuai dengan keadaan riil di lapangan. Akan tetapi KPU RI selalu pukul rata anggaran distribusi logistik meskipun medannya berbeda, tanpa melihat kebutuhan riil di lapangan. Misalnya perjalanan dinas untuk pelantikan penyelenggara *ad hoc* sebesar Rp. 60.000,- yang pasti tidak dapat menjangkau daerah dengan medan sulit.

Distribusi logistik melalui jalur sungai dapat terjadi masalah yaitu perahu yang terbalik atau kemasukan air. Strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Barito Kuala dengan memasukkan logistik pemilu ke dalam bungkus plastik, dan memasukkannya ke dalam tong plastic. Kebijakan ini bertentangan dengan *standar operating procedure* (SOP) terkait pengepakan logistik. Seharusnya logistik yang telah dibungkus plastik, dimasukkan ke dalam kotak suara dan dilakukan di kantor setempat. Surat suara yang telah dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tergebok dan tersegel diangkut ke kecamatan selanjutnya didistribusikan ke setiap desa dan TPS.

Untuk dapat mendistribusikan logistik tepat waktu, KPU Kabupaten Barito Kuala mendahulukan daerah dengan medan yang sulit. Langkah yang dilakukan ini tidak melebihi waktu yang telah ditentukan oleh KPU RI, akan tetapi mendahului. Jadwal distribusi logistik pada umumnya dimulai tiga hari sebelum hari pemungutan suara

Kesimpulan

Distribusi logistik melalui jalur sungai dapat terjadi masalah yaitu perahu yang terbalik atau kemasukan air. Strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Barito Kuala dengan memasukkan logistik pemilu ke dalam bungkus plastik, dan memasukkannya ke dalam tong plastic. Syarat agar logistik pemilu berfungsi efisien dan efektif antara lain tepat spesifikasi teknis, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat prosedur, tepat waktu, tepat anggaran dan tepat sasaran. KPPS harus sudah menerima alat kelengkapan TPS minimal 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Faktor-faktor yang menghambat distribusi logistik tepat waktu di KPU Kabupaten Barito Kuala dalam pemilu legislatif tahun 2014 yaitu kondisi geografis Kabupaten Barito Kuala yang sulit.

Saran

Anggaran yang diperlukan untuk transportasi, perjalanan dinas, dan distribusi logistik pemilu dengan medan tersulit harus disesuaikan dengan standar anggaran pemda Kabupaten Barito Kuala. KPU RI harus menetapkan klasifikasi biaya distribusi logistik, seperti daerah dengan medan yang mudah (tidak sulit) dan daerah dengan medan yang sulit distribusinya

DAFTAR PUSTAKA

Electoral Research Institute, 2015. *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014 Provinsi Papua*, Moch. Nurhasim, Jakarta: Electoral Research Institute

- Komisi Pemilihan Umum, 2014. *Buku Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2014*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum
- Komisi Pemilihan Umum, 2016. *Buku Pintar Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau, 2014. *Laporan Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Tahun 2013*
- Nainggolan, Franky Gilbert, 2017. *Distribusi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017*, Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Surbakti, Ramlan., Supriyanto, Didik dan Asy'ari, Hasyim, 2011. *Menjaga Kedaulatan Pilih*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum